

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Pada hakekatnya melalui penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka untuk mewujudkan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menjalankan otonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana konsep ini menuntut adanya pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada semua tingkatan (Patriadi, 2004). Hal ini harus didukung dengan adanya akuntabilitas publik yang merupakan syarat terbentuknya pemerintahan yang baik (*good government*).

Pengelolaan Pemerintahan yang bersih dan baik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu pengelolaan Pemerintahan yang baik dan bersih dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah harus bebas dari unsur penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana atau anggaran yang dikumpulkan dari rakyat dalam kaitannya untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, kejujuran dan kehati-hatian (Arsyati, dkk., 2008). Dengan adanya pemberian pelayanan yang baik, dan adanya tata kelola keuangan pemerintah yang baik serta adanya niat dari pemerintah untuk bersedia mempertanggungjawabkan dana atau anggaran yang terkumpul adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah yang digunakan sebagai dasar dari penerapan sistem tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance.

Perspektif keuangan bukan merupakan salah satu ukuran keberhasilan sebuah organisasi sektor publik, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya, karena surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, (Mardiasmo, 2004).

Pada dasarnya kinerja instansi adalah tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah berkaitan dengan penggunaan dana secara efisien dan efektif baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya (Arsyati, dkk,2008). Kinerja dalam suatu organisasi merupakan wujud prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Software Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah seperangkat aplikasi komputer yang digunakan untuk membantu proses administrasi data keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka memahami penerapan sistem informasi akuntansi, pihak kementerian/instansi pemerintahan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan sistem informasi akuntansi pemerintahan yang efektif perlu memahami adanya potensi pemahaman yang berbeda dalam memahami konsep sistem informasi antara manajemen, staf keuangan dan eksternal. Hal tersebut perlu diperhatikan karena sesuai dengan amanah pasal 1 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dinyatakan: suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Mendasarkan atas kerangka konseptual yang menjadi landasan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, perspektif informasi keuangan daerah lebih diarahkan pada pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sehingga dalam memahami penerapan sistem informasi akuntansi di kementerian/instansi pemerintah asumsi dasarnya adalah

sistem informasi keungan daerah harus memberikan kualitas penyajian informasi akuntansi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif sehingga untuk mewujudkan diperlukan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat menacapai tujuannya.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama suatu instansi pemerintahan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas pemerintahan. Sumber daya manusia yang cakap mampu dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik apabila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka baru bermanfaat apabila dapat mendukung terwujudnya tujuan organisasi. Sumber daya yang kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil akan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya (Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, 2008).

Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi dewasa ini, sistem informasi akuntansi telah berkembang menjadi sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi

yang terkomputerisasi memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat laporan keuangan setiap saat dengan lebih cepat dan akurat. Penyajian informasi keuangan dan *non*-keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya dukungan paket program sistem informasi akuntansi yang dewasa ini semakin banyak variasinya dan dapat diperoleh dengan mudah di pasaran (Istianingsih dan Wiwik, 2009).

Efektif tidaknya informasi akuntansi yang disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh kualitas penyajiannya. Semakin tinggi kualitas penyajian informasi yang tersedia bagi para pembuat keputusan maka akan semakin baik keputusan yang dihasilkan. Nilai informasi dan kekuatan dari suatu keputusan dapat dipengaruhi oleh kualitas yang melekat pada informasi. Kualitas informasi yang berguna mencakup relevan, andal, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat diukur dan konsisten (Wilkinson dalam Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, 2008).

Dalam pelaksanaannya masih terdapatnya kualitas penyajian informasi akuntansi yang belum terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai, antara lain hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi yang tidak puas dengan kinerja sistem informasi akuntansi yang telah dikembangkan ataupun telah ditetapkan oleh instansi pemerintahan tersebut, sehingga menimbulkan keluhan serta kerugian dikarenakan sistem informasi akuntansi tersebut dapat menghambat aktivitas operasional pengguna sistem informasi akuntansi.

Adapun masalah yang berkaitan dengan kualitas penyajian informasi akuntansi sebagai dampak akibat dari kurangnya faktor pendidikan dan pelatihan didalam menyajikan informasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didalam menilai pengelolaan tata keuangan dan aset di provinsi Kalimantan Timur belum baik. Bahkan dari hasil laporan keuangan 2010 Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, dan Nunukan di Kalimantan Timur mendapat predikat Tidak Wajar (TW) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keseluruhan kondisi tata kelola keuangan di Kaltim masih harus ditingkatkan. Predikat tidak wajar ini karena laporan yang dibuat oleh staf keuangan tersebut bermasalah dalam memaparkan hal aset daerah, kesalahan penganggaran, penyajian stok (persediaan), utang dan piutang daerah, pertanggungjawaban pendapatan dan belanja, penggunaan langsung penerimaan, termasuk di antaranya laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas, dan investasi. Ini menandakan adanya kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam menyajikan laporan keuangan yang nyata di kabupaten kota tersebut. Dia menyarankan agar kepala daerah memberikan pendidikan atau pelatihan kepada staf sehingga kualitas sistem informasi akuntansinya meningkat, terutama didalam menyajikan informasi akuntansi yang didukung dengan perkembangan teknologi yang baik. Bahkan bila tidak punya SDM untuk dilatih, dia menyarankan untuk merekrut karyawan langsung dari kampus-kampus atau lembaga pendidikan tinggi yang kualitas lulusannya tak diragukan. (www.okezone.com)

Sementara itu selain fenomena seperti yang telah disebutkan, hal lain yang dapat menyebabkan fenomena dari kualitas penyajian informasi akuntansi

yang masih penulis dapatkan dari kasus yang terjadi di Indonesia yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sukoharjo, Jawa Tengah yang tidak memahami perangkat teknologi komputer atau sering disebut gagap teknologi (gaptek). Akibatnya, administrasi keuangan berbasis komputer pun terhambat dengan kemampuan para PNS yang mengakibatkan kualitas laporan keuangan tidak berkualitas. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo mengakui kekurangan para PNS didalam menggunakan teknologi informasi. Ia pun mendapat permintaan agar PNS mendapat tenaga tambahan untuk mengoperasikan komputer guna kepentingan administrasi di kantor masing-masing. "Memang ini menjadi permasalahan. Di saat kita melakukan efisiensi PNS agar tidak terlalu banyak, malah ada permintaan tambahan tenaga, yang jelas kita tidak akan berikan. Namun kita akan tawarkan bina teknologi pengoperasian komputer kepada mereka," dan hampir seluruh PNS yang tersebar di 17 kelurahan mengalami masalah yang sama. Lantaran itu, mereka akan mendapat bimbingan penguasaan teknis mengoperasikan perangkat komputer dengan membuat laporan keuangan yang lebih cepat dan tepat didalam menyajikan laporan keuangan yang disajikan. (www.metrotvnews.com)

Ketidak pahaman PNS Sukoharjo, Jawa Tengah dalam mengoperasikan perangkat komputer tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena kurangnya penguasaan komputer yang mengakibatkan penyajian informasi akuntansi pada daerah Sukoharjo tidak berkualitas. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo seharusnya tidak usah menambah tenaga tambahan untuk mengoperasikan komputer tetapi memberikan pendidikan dan pelatihan agar para

PNS di Sukoharjo dapat menguasai komputer dengan baik. Sehingga didalam menyajikan informasi akuntansi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan para pengguna sistem informasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian informasi akuntansi. Efektif tidaknya informasi akuntansi yang disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh kualitas penyajiannya. Semakin tinggi kualitas penyajian informasi yang tersedia bagi para pembuat keputusan maka akan semakin baik keputusan yang dihasilkan.

Menurut Mardiasmo (2005:189), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian informasi akuntansi telah banyak dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya yaitu diantaranya seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, penguasaan komputer (Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, 2008).

Dalam Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia menyatakan: “Runtuhnya perekonomian di Indonesia akibat gejolak sosial politik, ekonomi dan budaya, dan yang signifikan adalah masalah SDM. Dalam sejarah dicatat bahwa manusia sebagai subyek yang memegang peranan untuk mengatasi krisis SDM yang melanda seluruh bangsa Indonesia”. Seperti yang dikemukakan oleh (Surya Dharma dalam Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, 2008). Manusia merupakan aset terpenting bagi organisasi karena melalui manusia organisasi dikembangkan, pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dan inovasi diwujudkan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan ataupun negara dalam bersaing ditentukan oleh SDM-nya. SDM merupakan tulang punggung operasional sehingga harus terus dilakukan peningkatan kualitas, baik secara internal maupun eksternal. Hal senada diungkapkan oleh (Kamoto Mohamad dalam Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, 2008). Sumber daya manusia yang profesional, bermoral, baik, jujur dan berintegritas merupakan tulang punggung perusahaan. Dalam bisnis perbankan, SDM juga berperan sebagai “penjaga gawang” prinsip kehati-hatian, patuh pada sistem dan prosedur sekaligus mampu menciptakan kultur *good corporate governance (GCG)*.

Untuk meningkatkan kualitas SDM dapat ditempuh melalui program pelatihan internal maupun eksternal (Herman Abdulrahman dalam Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, 2008). Pelatihan merupakan aktifitas yang didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan saat ini (Mondy et al dalam Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, 2008). Pelatihan biasanya dilaksanakan pada saat para pekerja memiliki keahlian yang kurang atau

pada saat suatu organisasi mengubah suatu sistem dan perlu belajar tentang keahlian baru. Dengan pelatihan dan pendidikan, pemakai bisa mendapatkan kemampuan untuk mengidentifikasi persyaratan informasi mereka dan kesungguhan serta keterbatasan Sistem informasi dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan kinerja. Kegiatan pelatihan ditujukan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan pengguna sistem (Montazemi dalam Acep Komara, 2005). Pendidikan dan pengalaman juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas SDM ditambah lagi dengan penguasaan komputer yang bagus sehingga akan sangat mendukung dalam melakukan suatu pekerjaan. Investasi dalam bidang pendidikan akan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang (Robbins dalam Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, 2008).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Reno Fithri Meuthia dan Endrawati pada tahun 2008 dengan judul faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan penguasaan komputer staf bagian akuntansi terhadap penyajian informasi akuntansi menggunakan variabel-variabel berikut, faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, penguasaan komputer dan kualitas penyajian informasi akuntansi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan penguasaan komputer secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi. Walaupun mengacu pada penelitian Reno Fithri Meuthia dan Endrawati, tetapi penulis akan meneliti tiga faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian informasi akuntansi yaitu faktor

pendidikan, pelatihan, dan penguasaan komputer. Selain itu adanya perbedaan dimensi, lokasi penelitian, alat analisis, dan tahun penelitian.

Pertimbangan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pengaruh faktor pendidikan, pelatihan, dan penguasaan komputer staf bagian keuangan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Cianjur. Hal ini dikarenakan dari setiap fenomena yang saya dapat berada pada lingkungan pemerintah daerah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat kemampuan Pemda Kabupaten Cianjur dalam memahami daerahnya serta bagaimana pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat mempengaruhi kinerja pada instansi Pemda Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan diatas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya kedalam skripsi dengan judul penelitian **“Pengaruh Faktor Pendidikan, Pelatihan dan Penguasaan Komputer Staf Bagian Keuangan Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi (Survey pada SKPD Kabupaten Cianjur)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana faktor pendidikan staf bagian keuangan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
2. Bagaimana pelatihan staf bagian keuangan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
3. Bagaimana penguasaan computer staf bagian keuangan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
4. Bagaimana kualitas penyajian informasi akuntansi staf bagian keuangan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
5. Seberapa besar pengaruh faktor pendidikan, pelatihan, dan penguasaan komputer staf bagian keuangan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi secara parsial yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
6. Seberapa besar pengaruh faktor pendidikan, pelatihan dan penguasaan komputer staf bagian keuangan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi secara simultan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendidikan staf bagian keuangan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui pelatihan staf bagian keuangan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui penguasaan komputer staf bagian keuangan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
4. Untuk mengetahui kualitas penyajian informasi akuntansi staf bagian keuangan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor pendidikan, pelatihan dan penguasaan komputer staf bagian keuangan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi secara parsial yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor pendidikan, pelatihan dan penguasaan komputer staf bagian keuangan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi secara simultan yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Cianjur

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat melengkapi khasanah pengetahuan dibidang ilmu akuntansi khususnya faktor pendidikan, pelatihan, penguasaan komputer dengan kualitas penyajian informasi akuntansi dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menjelaskan pengaruh faktor pendidikan, pelatihan dan penguasaan komputer staf bagian keuangan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi. Serta dapat menjelaskan dan memberikan bukti-bukti yang otentik dan empiris serta menjabarkan secara detail dan rinci.
 - b. Dapat menambah pengetahuan penulis dan sebagai syarat akhir dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi/Jurusan Akuntansi di Universitas Pasundan.
2. Bagi Instansi/ pemerintahan yang bersangkutan

Dapat memberikan masukan dan saran kepada instansi/ pemerintahan dalam mengevaluasi sistem yang sedang berjalan, sehingga di kemudian

hari sistem yang sudah ada dapat lebih disempurnakan dan diharapkan kinerja perusahaan pun akan semakin meningkat.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai besar pengaruh faktor pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan penguasaan komputer staf bagian keuangan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

5. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Bagian Keuangan pada SKPD Kabupaten Cianjur. di dalam melaksanakan kualitas penyajian informasi akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada dua puluh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung, yaitu:

1. Sekretariat Daerah

2. BAPPEDA
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga
5. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan
7. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Perpajakan Daerah
16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
18. Badan Lingkungan Hidup Daerah
19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
20. Kantor Arsip Perpustakaan Daerah
21. Satuan Polisi Pamong Praja

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu

yang telah ditentukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yaitu pada 17 Juni – 25 Juni 2015.